

Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia

Ainol Yaqin^{1*}, Talitha Monique Zuleika²⁾
^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid
*Email korespondensi: ainolyaqin1991@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal is to examine the evolution of Islamic banking practices as a means of enhancing financial awareness in Indonesia. In order to increase the general public's access to products and financial services that are fair, affordable, and useful, they are referred to as financial inclusion. The Islamic banking system has become a crucial alternative in the Indonesian financial system. Deskriptif analysis is the research method used in this journal. Data are obtained through relevant secondary data sources and research studies. This analysis will show how Islamic banks operate in Indonesia, how Islamic banks maintain their financial integrity, and the problems that arise when they are expanding. Research indicates that the rise in Islamic banks has helped to increase awareness of money in Indonesia. However, numerous challenges are faced by the syariah banking sector. Several of these include inadequate infrastructure, inadequate knowledge about goods and services provided by Islamic banks, and regulations that have not yet fully addressed the root causes of the problem. Due to this, the journal also offers advice on how to resolve the issue and encourage the development of more sensitive Islamic banks in Indonesia.

Keywords: sharia banking, financial inclusion, development, financial literacy

Saran sitasi: Yaqin, A., & Zuleika, T. M. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1130-1138. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Perkembangan ini ditunjukkan dengan munculnya reksa dana syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Di pasar keuangan syariah, sektor perbankan syariah telah berkembang dengan sangat cepat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Sektor perbankan syariah memiliki kemampuan untuk membantu transformasi ekonomi menjadi ekonomi yang inklusif, produktif, dan bernilai tambah. Layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi termasuk digital banking, asuransi digital online, sistem jalur pembayaran, dan lainnya. Diharapkan bahwa layanan berbasis teknologi ini akan meningkatkan kualitas operasional dan layanan perbankan bagi masyarakat. Seiring dengan

perkembangan teknologi di masyarakat, teknologi diperlukan untuk diterapkan dalam industri perbankan (Husna, 2020).

Industri perbankan adalah salah satu bidang ekonomi yang sangat membutuhkan teknologi. Terkait hal ini, di dunia perbankan dikenal dengan istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Jenis inovasi dalam industri keuangan yang disebut *FinTech* telah menggunakan perangkat teknologi untuk membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah. Seperti yang telah diketahui, revolusi industri 4.0, yang melibatkan penggunaan teknologi secara besar-besaran, sedang berlangsung, dan masuknya *FinTech* ke dalam industri perbankan menunjukkan bahwa revolusi ini sedang berlangsung. Bank Indonesia juga menyebut *FinTech* sebagai inovasi baru yang menggabungkan teknologi dan jasa keuangan. Oleh karena itu, gagasan *FinTech* ini bergabung dengan industri perbankan untuk

menghasilkan ide-ide baru yang memungkinkan transaksi keuangan yang lebih efisien.

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang tinggi sekitar 87% dari total penduduk, atau 207 juta orang yang memberinya peluang besar untuk mengembangkan kemajuan perbankan syariah berbasis digital di era digital saat ini, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Bisnis perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi yang sebagian besar beragama Islam. Pada saat ini, hampir seluruh bank umum di Indonesia telah memiliki produk bank yang dioperasikan dengan prinsip pengelolaan dana syariah (Werdi et al., 2017).

Inklusi keuangan adalah entitesis dari *financial exclusion*. Dibutuhkan inovasi baru untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang inklusif, karena praktik ekonomi eksklusif telah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dalam kenyataannya, sistem layanan keuangan inklusif bertujuan untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang mendukung kalangan berpenghasilan rendah dan miskin (Mardani et al., 2018).

Sebagaimana dijelaskan oleh Andrew Leyson dan Nigel Thrift, *financial exclusion* mengacu pada prosedur yang menghalangi kelompok sosial yang kurang mampu dan kurang beruntung dari akses ke sistem keuangan formal. Karena pendapatan, pembangunan ekonomi, dan perbedaan geografis, ini mengakibatkan pembangunan yang tidak merata (Leyson et al., 2015). Pada temuan penelitiannya, James F. Davlin menunjukkan bahwa *financial exclusion* adalah topik peningkatan bunga yang terjadi dalam kasus di mana masyarakat menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke institusi keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran keuangan jelas bermasalah. Status pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kepemilikan perumahan, status perkawinan, usia, dan tingkat kualifikasi akademik adalah faktor yang paling konsisten dan signifikan yang mempengaruhi *financial exclusion* (Devlin, 2005). Menurut Andrew Leyson, et al., *financial exclusion* adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk mendapatkan layanan keuangan. Rakyat miskin kesulitan untuk keluar dari kemiskinan, karena lembaga keuangan memiliki banyak persyaratan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan dana.

Pada tahun 2010, inklusi keuangan baru dimulai di Indonesia. Dalam upaya, untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan keuangan, Bank Indonesia meluncurkan program National Strategy for Inklusi Keuangan (NSFI). Selama ini, 76 juta orang, atau 32% dari populasi, sama sekali belum tersentuh jasa keuangan. Selain itu, sekitar 60 hingga 70 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak memiliki akses ke perbankan. Meskipun demikian, hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki peluang yang sangat besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Nengsih, 2023).

Di Indonesia, perbankan syariah memainkan peran penting dalam penerapan inklusi keuangan. Pada tahun 2008, industri perbankan syariah memiliki 155 anggota, terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah ini saat ini terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan menggunakan produk keuangan yang tidak berbunga. Ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), 33 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 169 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada Januari 2023 (OJK, 2023). Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998, 2008, dan krisis yang melanda Eropa pada tahun 2011. Perkembangan kuantitas ini telah menyebar dari pusat ke daerah, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya.

Jika inklusi keuangan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi dapat berkorelasi dengannya. Menurut Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76 Tahun 2016, inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa keuangan, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa keuangan, dan meningkatkan jumlah dan kualitas penggunaan barang dan jasa keuangan. Terlihat bahwa tiga elemen utama inklusi keuangan adalah: (1) memberikan akses yang mudah; (2) menyediakan layanan terbaik; dan (3) menyediakan produk keuangan dengan kualitas terbaik.

22 November 2022, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. SNLIK 2022 berlangsung dari Juli hingga September 2022 di 34 provinsi dan 76 kota/kabupaten, dengan jumlah

responden 14.634 orang berusia antara 15 dan 79 tahun. SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter, dan indikator yang sama seperti tahun 2016 dan 2019. Indeks literasi keuangan terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sedangkan indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

Tabel 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022

Indeks	2019	2022
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	78,19%	85,10%
Gap	38,16%	35,42%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022.

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dari 38,03 persen pada tahun 2019, dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10% tahun ini, meningkat dari periode SNLIK sebelumnya, 76,19%, pada tahun 2019. Ini menunjukkan pergeseran antara literasi dan inklusi semakin menurun, dari 38,16% pada tahun 2019 menjadi 35,42% pada tahun 2022.

Selain itu, SNLIK 2022 mengukur literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022. Selain itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga meningkat dari 9,10% pada periode survei pada tahun 2019 menjadi 12,12% di tahun 2022.

Tabel 2. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022.

Sebagai bagian dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), mengalami kenaikan berjumlah 462 di tahun 2022 daripada tahun 2019 berjumlah 171, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan, dan berbagai pihak lainnya telah bekerja sama untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan.

Terdapat 3 poin inti yang harus dicapai dalam keuangan inklusi, menurut Erlando, et al., (2020), biasanya nilai dari index keuangan ditentukan oleh 3 aspek dimensi yaitu: (1) *accessibility*, digunakan untuk mengetahui bagaimana akses yang buruk ke sektor keuangan formal; (2) *availability*, digunakan

untuk mengukur jumlah jasa sektor keuangan yang tersebar ke semua masyarakat; (3) *usability*, digunakan untuk menentukan kemampuan masyarakat miskin untuk menggunakan layanan keuangan formal. Ketiga dimensi ini akan menjadi indikator untuk mengukur pengaruh Inklusi Keuangan Syariah kedepannya.

Pandemi awal tahun 2020 mendorong transformasi digital dalam pendidikan keuangan, yang memungkinkan pengajaran keuangan secara luas dan tidak terbatas. Untuk mempercepat peningkatan pengetahuan dan inklusi keuangan, kombinasi pendekatan edukasi keuangan secara tatap muka dan daring serta penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi penting.

Hasil SNLIK 2022 sangat penting bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan, strategi, dan layanan keuangan yang sesuai dengan permintaan konsumen dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023, OJK berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia. Arah Strategis Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.

Sasaran prioritas literasi keuangan pada tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Sementara itu, sasaran prioritas inklusi keuangan pada tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa, UMKM, masyarakat di perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah (OJK, 2022.).

Namun, kemajuan besar dalam porsi pasar dan indeks inklusi keuangan perbankan syariah di Indonesia belum mengimbangi kemajuan secara kuantitas. Per Juni 2022, pangsa pasar keuangan syariah tercatat sebesar 10,41%, sebuah peningkatan dari 10% pada tahun sebelumnya (Nengsih, 2023). Meskipun ada peningkatan, satu hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan yang masih besar dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Pangsa pasar keuangan syariah yang rendah menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan

bahwa indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12%, jauh di belakang indeks keuangan umum yang mencapai 85,10% (Ojk, 2022).

KAJIAN TEORI

Tujuan utama dari skema pembiayaan inklusif yang dikenal sebagai inklusi keuangan adalah untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Terlepas dari definisi PBB, istilah inklusi keuangan mengacu pada akses ke berbagai jasa keuangan dengan biaya yang wajar bagi individu yang dianggap tidak bankable serta individu yang bekerja di sektor pedesaan, seperti pertanian dan peternakan (Imboden et al., 2006). Sejalan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rangarajan Komite mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan bahwa layanan keuangan diberikan kepada orang miskin atau berpenghasilan rendah. Mereka biasanya berupa kredit dengan jangka waktu dan biaya pengembalian yang wajar (Dasgupta, 2009).

Ada sejumlah peneliti yang mencoba membuat kesimpulan tentang inklusi keuangan. Dalam penelitiannya yang berjudul *Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion*, Gayathri Band, Kanchan Naidu, Tina Mehadia mengatakan bahwa inklusi keuangan adalah ketika kelompok miskin dan rentan memiliki akses ke pembiayaan, yang merupakan syarat untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mereka juga mengatakan bahwa memberikan akses ke layanan keuangan dengan harga terjangkau merupakan bentuk pemberdayaan kelompok miskin (Band Gayathri et al., 2012).

Menurut Demirguc Kunt dan Leora Klapper, inklusi keuangan adalah sistem keuangan yang berfungsi dengan baik yang mencapai tujuan penting seperti memberikan tabungan, kredit, pembayaran, dan produk manajemen risiko kepada orang-orang dengan berbagai macam kebutuhan. Sistem inklusi keuangan memungkinkan akses luas ke layanan keuangan tanpa hambatan harga atau non-harga untuk penggunaannya (Demirguc-Kunt et al., 2012).

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2008), Perbankan Syariah mencakup semua yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, bisnis, dan metode dan prosedur untuk menjalankan bisnis mereka. Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khmous et al., (2020), saham perbankan syariah umumnya berdampak negatif terhadap inklusi keuangan. Hal ini disebabkan oleh produk syariah yang tidak menarik, biaya yang tinggi, dan informasi yang kurang tentang pelanggan tentang bank syariah. Namun, menariknya, analisis tersebut menunjukkan bahwa pengaruh perbankan syariah terhadap inklusi keuangan lebih besar (lebih kuat) di negara-negara berpenghasilan tinggi, studi ini juga menemukan bukti bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih baik, terutama bagi individu beragama yang menolak bank dengan riba (bunga) (Khmous et al., 2020).

Dalam program pembangunan ekonomi Indonesia, inklusi keuangan telah menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan perbankan syariah di sini telah mendapat perhatian khusus sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan. Sektor keuangan berbasis syariah yang dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjanjikan untuk memberikan akses keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengembangan perbankan syariah membantu inklusi keuangan di Indonesia.

Ketersediaan akses ke berbagai sumber daya keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebut inklusi keuangan. Menurut Erlando et al., (2020), inklusi keuangan berarti bahwa orang dan perusahaan diberikan akses ke berbagai layanan dan produk keuangan yang tepat dan murah yang memenuhi kebutuhan mereka. Ini termasuk transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, antara lain. Menurut sebagian besar teori, inklusi keuangan syariah didefinisikan sebagai akses dan layanan terbaik untuk menggunakan layanan keuangan syariah, baik melalui perbankan syariah maupun institusi keuangan non-perbankan syariah, yang menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kualitas terbaik. Dalam maqashid syariah, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pemerataan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari

kesejajaran ekonomi yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam inklusi keuangan, tiga kata kunci utama adalah penyediaan akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan. Berdasarkan ketiga kata kunci ini, inklusi keuangan didefinisikan sebagai memberikan akses bagi masyarakat miskin, juga dikenal sebagai masyarakat termarginalkan, untuk memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Dalam inklusi keuangan, tiga dimensi yang harus diperhatikan adalah aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan sistem. Hal ini disebabkan fakta bahwa masyarakat miskin lebih rentan terhadap masalah aksesibilitas sektor keuangan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin.

Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah indikator keuangan inklusif yang digunakan di Indonesia. Pada dasarnya, IKI adalah upaya Bank Indonesia untuk menggabungkan indikator sektor perbankan yang berbeda untuk mengukur inklusi keuangan. IKI menggunakan indeks multidimensional yang didasarkan pada data makroekonomi, khususnya yang berkaitan dengan jangkauan layanan sektor perbankan.

2. METODE PENELITIAN

Analisis konten, atau analisis konten, adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Proses analisis konten terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penampilan data, penarikan kesimpulan. Untuk membuat data lebih mudah dipahami, data dari artikel jurnal direduksi, dirangkum, dipilih poin penting, dan kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan diteliti. Display data menampilkan informasi yang diperoleh dari reduksi data yang memungkinkan pengambilan kesimpulan data yang relevan dengan penelitian yang dimaksud. Penarikan kesimpulan adalah proses di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan yang lebih mendasar tentang topik penelitian.

Setelah data dikumpulkan, analisis isi dilakukan dengan menggunakan metode Miles and Huberman, yang mencakup pemilahan data, seleksi data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis beberapa artikel yang membahas Pengembangan Perbankan Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. Pertama, untuk mengumpulkan data dilakukan pencarian dengan

menggunakan kata kunci “perkembangan bank syariah” dan “inklusi keuangan” dengan menggunakan basis data Google Scholar pada tahun 2005-2023. Kedua, dilakukan analisis terhadap data artikel dengan menyesuaikan tema penelitian yaitu pengembangan perbankan syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Tahap ketiga mengelompokkan artikel terkait penulis, fokus perkembangan bank syariah dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Menurut Aman Sentosa, Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, aset keuangan syariah menyumbang 11% dari seluruh nilai aset keuangan di Indonesia. Terlepas dari tren yang positif dalam keuangan syariah, indeks literasi keuangan syariah masih rendah.

Dalam acara Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2023, Senin, 22 Mei 2023, Aman mengatakan, "Data dari survei nasional dan inklusi keuangan tahun 2022 menunjukkan literasi keuangan syariah baru mencapai 9,1%. Ini sangat jauh dari literasi di sektor keuangan konvensional yang hampir mencapai 50%." Sementara itu, hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan perbedaan, dengan indeks literasi dan keuangan syariah nasional berada di 23,3%.

Dia menyatakan bahwa pada dasarnya masih ada perbedaan pengetahuan tentang keuangan syariah dibandingkan dengan yang konvensional. Namun, disyukuri bahwa pengetahuan tentang keuangan syariah terus meningkat setiap tahun, meskipun masih jauh di bawah pengetahuan tentang keuangan konvensional yang mencapai 49% hingga 50%.

Namun, dia mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan keuangan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan, yang telah menyebabkan berbagai krisis sebelumnya. "Literasi keuangan rendah juga pangkal dari tingginya ketidakpuasan dan pengaduan masyarakat terhadap layanan jasa keuangan termasuk panduan terkait investasi bodong, pinjol, dan lain lain, karena pengetahuan mengenai produk-produk", katanya.

Sebagai informasi, hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%.

Sementara, indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16% di tahun 2019 menjadi 35,42% di tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Fokus OJK pada tahun 2023 adalah meningkatkan pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia. Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN. Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar, santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Dengan menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah membantu inklusi keuangan. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk menggunakan layanan perbankan, terutama mereka yang sebelumnya tidak dapat menggunakan sistem perbankan konvensional. Dengan adanya pilihan perbankan syariah, inklusi keuangan dapat diperluas ke komunitas yang mungkin memiliki preferensi atau nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan uang.

Perbankan syariah juga cenderung membantu bisnis kecil dan menengah berkembang dengan memberikan pembiayaan mikro dan kredit kepada industri yang mungkin diabaikan oleh perbankan konvensional. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya memberikan akses keuangan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, munculnya lebih banyak lembaga keuangan syariah dan produk inovatifnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan Islam. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk bergabung dengan sistem keuangan formal. Untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, regulasi, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung perbankan syariah harus diperkuat.

Perbankan syariah sangat membantu inklusi keuangan dan mencapai kesetaraan akses ke layanan keuangan bagi seluruh masyarakat. Ini juga membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2. Pembahasan

Inklusi keuangan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan adalah upaya untuk menghilangkan berbagai macam hambatan, baik harga maupun non-harga, yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan, sehingga meningkatkan kesetaraan taraf hidup masyarakat yang sulit dijangkau (Fahmy et al., 2016).

Tujuan inklusi keuangan adalah untuk membuat sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua orang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, menciptakan pemerataan pendapatan, dan memastikan sistem keuangan stabil di Indonesia.

Perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Beberapa peran utama perbankan syariah dalam inklusi keuangan adalah sebagai berikut (Mardani et al., 2018):

- a. Memberikan Akses Keuangan untuk Segmen Masyarakat yang Tidak Terlayani: Tujuan perbankan syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ditujukan untuk semua orang, termasuk segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Perbankan syariah membantu orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, berpendapatan rendah, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan uang dengan mendekati nilai-nilai keadilan.
- b. Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Inklusif: Perbankan syariah berusaha untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih inklusif, seperti pembiayaan mikro, tabungan syariah, dan asuransi syariah. Produk dan layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan individu dengan berbagai tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi, sehingga memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau bagi semua orang.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Rendah: Perbankan syariah berusaha untuk memberdayakan masyarakat dengan pendapatan rendah atau kelompok ekonomi rentan melalui pembiayaan syariah, yang mendorong kemandirian dan pembangunan ekonomi lokal. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai ketahanan finansial

melalui penerapan prinsip keadilan dan berbagi risiko.

- d. Meningkatkan Literasi dan Pendidikan Keuangan: Perbankan syariah juga berkontribusi pada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan dan pendidikan yang relevan. Ini dicapai melalui program edukasi keuangan yang bertujuan untuk memberi masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan risiko dari barang dan jasa keuangan syariah. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang keuangan, orang-orang dapat membuat pilihan keuangan yang lebih bijak dan memanfaatkan barang dan jasa tersebut secara optimal.
- e. Mendorong Inovasi dan Teknologi Keuangan: Perbankan syariah juga berpartisipasi dalam mendorong inovasi dan teknologi keuangan, juga dikenal sebagai fintech, yang dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan. Perbankan syariah dapat mempermudah dan mempercepat akses keuangan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan fisik. Ini dapat dicapai melalui penggunaan teknologi digital dan platform digital.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah selama pengembangannya harus diatasi agar sektor ini dapat berkembang lebih lanjut dan mendukung inklusi keuangan secara efektif. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut (Abdul et al., 2022):

- a. Kesadaran Masyarakat: Banyak orang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dan keuntungan dari produk dan layanan keuangan syariah, dan ada beberapa wilayah di mana kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah. Pembelajaran dan peningkatan kesadaran tentang perbankan syariah sangat penting untuk memperluas basis nasabah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Literasi Keuangan: Literasi keuangan di Indonesia perlu ditingkatkan, termasuk pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah. Masyarakat yang tidak memahami keuangan dapat menghadapi risiko dalam pengambilan keputusan keuangan, yang dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah.
- c. Regulasi dan Kebijakan: Beberapa regulasi dan kebijakan perbankan syariah belum memadai atau

tidak jelas bagaimana menerapkannya, yang dapat menyulitkan untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif dan memenuhi permintaan pasar.

- d. Infrastruktur dan Teknologi: Peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung perbankan syariah. Beberapa daerah di Indonesia, terutama yang terpencil, mungkin masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan teknologi dan perbankan.
- e. Keberlanjutan dan Stabilitas: Agar dapat berperan secara efektif dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, perbankan syariah juga harus menghadapi tantangan terkait keberlanjutan dan stabilitas operasional.
- f. Kompetensi Perbankan Konvensional: Perbankan syariah menghadapi persaingan yang ketat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah mungkin tidak menarik bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbankan konvensional. Akibatnya, perbankan syariah harus terus berinovasi dan meningkatkan daya tarik barang dan jasanya.

Perbankan syariah harus bekerja sama dengan pemerintah, perbankan syariah, regulator, akademisi, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan ini, perbankan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peluang dalam Mengembangkan Perbankan Syariah (Zia et al., 2022):

- a. Pasar yang Luas: Karena populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk perbankan syariah. Dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, perbankan syariah memiliki peluang untuk meningkatkan partisipasi dan penetrasi di pasar keuangan Indonesia.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melalui kampanye pemasaran yang efektif dan edukasi yang tepat, ada peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah dan produk keuangan syariah.
- c. Peningkatan Literasi Keuangan: Upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

keuangan juga memungkinkan perbankan syariah untuk menjadi lebih relevan dan mendekati masyarakat dari berbagai lapisan.

- d. Dukungan dari Pemerintah dan Regulator: Dalam upaya mereka untuk mewujudkan inklusi keuangan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung perbankan syariah. Dengan dukungan pemerintah dan regulasi yang lebih jelas, perbankan syariah dapat berkembang.
- e. Peran sebagai Agen Perubahan: Perbankan syariah memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai agen perubahan dalam membentuk ekonomi yang didasarkan pada keadilan dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah memiliki kemampuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif.
- f. Inovasi Produk dan Layanan: Perbankan syariah dapat menarik lebih banyak klien dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dengan melakukan inovasi produk dan layanan yang tepat.
- g. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Lain: Kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti perbankan konvensional dan lembaga keuangan mikro memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, perbankan syariah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia dan membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah telah membantu inklusi keuangan di Indonesia. Perbankan syariah menawarkan layanan keuangan kepada kelompok orang yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh perbankan konvensional. Selain itu, produk dan layanan perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan telah berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam bidang keuangan di Indonesia. Penelitian sebelumnya (Khmous et al., 2020) mendukung hasil penelitian ini. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pengaruh perbankan

syariah terhadap inklusi keuangan lebih besar (lebih kuat) di negara-negara berpenghasilan tinggi, studi ini juga menemukan bukti bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih baik, terutama bagi individu beragama yang menolak bank dengan riba (bunga).

Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan, pengembangan program literasi keuangan, advokasi dan keterlibatan pemerintah, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, inovasi produk dan layanan, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan lain adalah beberapa solusi yang dapat dilaksanakan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya pada kesempatan ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberi dukungan dalam situasi apa pun. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, terutama Jurusan Perbankan Syariah. Tak lupa juga kepada semua pimpinan dan pengelola *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) STIE AAS Surakarta* karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Band Gayathri, Naidu Kanchan, & Mehadia Tina. (2012). Opportunities & Obstacles To Financial Inclusion. *A Journal of Economics and Management*, 1(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Dasgupta, R. (2009). Two Approaches to Financial Inclusion. *Economic and Political Weekly*, 44(26/27), 41–44. <http://www.jstor.org/stable/40279775>
- Demircuc-Kunt, A., Klapper, L., & Bank, T. W. (2012). *Measuring Financial Inclusion The Global Findex Database*. <http://econ.worldbank.org>.
- Devlin, J. F. (2005). A Detailed Study of Financial Exclusion in the UK. *Journal of Consumer Policy*, 28(1), 75–108. <https://doi.org/10.1007/s10603-004-7313-y>

- Fahmy, O. M., & Rustam, M. (2016). Pengaruh Keuangan Inklusif Terhadap Kredit yang Disalurkan pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* (Vol. 5, Issue 2).
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i1.11328>
- Imboden, K., Herman, B., & Petkoski, D. (2006). *SUMMARY REPORT ECONFERENCE ON: Building Inclusive Financial Sectors for Development: Widening Access, Enhancing Growth, Alleviating Poverty*. <https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/se-msc2005-Report-WBI.pdf>
- Khmous, D. F., & Besim, M. (2020). Impact of Islamic banking share on financial inclusion: evidence from MENA. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 655–673. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2019-0279>
- Mardani, D. A., Sy, M. E., Tinggi, S., Islam, A., & Jawa Barat, T. (2018). *PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEUANGAN INKLUSIF DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161568>
- Nengsih, N. (2023). STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA. *AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i1.9164>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *SP - SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2022*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
- Werdi, H., Korespondensi, A., & Apriyanti, H. W. (2017). AKUNTANSI SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK. In *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 6, Issue 2).
- Zia Ulhaq, M., & Rasyad Al Fajar, M. (2022). PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1>